

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan terkait dengan mekanisme penyusunan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan penting sebagai berikut:

1. Acuan terhadap Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 Setiap program maupun kegiatan yang dirancang oleh masing-masing bidang dalam lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang senantiasa berpedoman pada dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021. Dokumen perencanaan ini memiliki fungsi yang sangat penting, yakni sebagai arahan dalam penyusunan kebijakan, strategi pemanfaatan aset, serta sebagai tolok ukur yang digunakan dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. RENSTRA bukan hanya sekadar dokumen formal, melainkan juga instrumen yang menjamin agar seluruh aktivitas dinas selaras dengan visi dan misi pembangunan daerah. Selain itu, RENSTRA juga mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, khususnya yang berkaitan dengan tata kelola pendapatan, pengelolaan keuangan, serta pemanfaatan aset daerah secara efektif dan efisien.
2. Kesesuaian dengan Peraturan Pemerintah dan Kebijakan Daerah  
Proses penyusunan anggaran di Dinas PUPR Kota Padang disusun

dengan memperhatikan dan berlandaskan pada ketentuan regulasi, terutama Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 yang mengatur tentang tata cara perencanaan, pengendalian, serta evaluasi pembangunan daerah. Regulasi tersebut menjadi kerangka hukum yang memastikan setiap langkah penyusunan anggaran berjalan sesuai prosedur yang berlaku secara nasional. Selain itu, mekanisme penyusunan anggaran juga melibatkan prosedur evaluasi terhadap berbagai dokumen perencanaan penting, antara lain Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta perubahan-perubahan pada dokumen perencanaan jangka panjang maupun jangka menengah daerah. Tidak hanya itu, penyusunan anggaran juga memperhatikan kebijakan tahunan yang secara langsung berhubungan dengan perencanaan keuangan daerah, sehingga keseluruhan proses menjadi lebih terarah, transparan, dan akuntabel.

## 1.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan mengenai prosedur penyusunan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang, penulis merumuskan beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi masukan konstruktif bagi instansi terkait dalam rangka peningkatan kualitas tata kelola anggaran ke depan. Adapun rekomendasi yang dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Peningkatan Fasilitas dan Sistem Pendukung. Dinas PUPR Kota Padang diharapkan terus melakukan pengembangan serta perbaikan terhadap sarana dan prasarana yang tersedia di lingkungan kerja. Hal ini mencakup penyediaan fasilitas fisik yang memadai, penguatan sistem informasi berbasis teknologi yang berfungsi khusus untuk pengelolaan anggaran, serta penambahan sarana pendukung lainnya. Tujuannya adalah agar seluruh pegawai dapat melaksanakan tugas dengan lebih efektif dan efisien. Selain itu, perbaikan fasilitas juga akan sangat membantu mahasiswa magang yang sedang menjalankan praktik kerja lapangan, sehingga mereka dapat belajar secara optimal serta memahami praktik penyusunan anggaran secara langsung. Pada akhirnya, langkah ini diharapkan mampu mendukung peningkatan mutu manajemen anggaran secara keseluruhan.
2. Kepatuhan terhadap Regulasi dan Kebijakan Nasional Dinas PUPR Kota Padang perlu memastikan bahwa setiap proses penyusunan anggaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku, baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Konsistensi dalam mematuhi peraturan yang telah ditetapkan menjadi aspek penting untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan legitimasi dari seluruh tahapan penyusunan anggaran. Selain itu, dinas juga dituntut untuk senantiasa menyesuaikan mekanisme perencanaan anggaran dengan perkembangan kebijakan nasional terbaru, sehingga program-

program yang disusun dapat selaras dengan arah pembangunan nasional dan kebutuhan daerah.

3. Pemeliharaan dan Peningkatan Kinerja dalam Penyusunan Anggaran.

Rekomendasi selanjutnya adalah agar Dinas PUPR Kota Padang terus menjaga, bahkan meningkatkan, kinerja yang telah dicapai dalam hal penyusunan anggaran. Upaya ini dapat dilakukan melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem evaluasi yang berkesinambungan, serta penguatan koordinasi antarbidang yang terlibat dalam proses perencanaan dan penganggaran. Dengan demikian, kualitas hasil anggaran yang disusun tidak hanya memenuhi standar prosedural, tetapi juga benar-benar dapat memberikan manfaat nyata dalam mendukung pembangunan daerah.

